

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN
EKONOMI MIKRO PRODUKSI IKAN SALAI
DI KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Strata 1
Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Disusun Oleh :

**PUTRI AFIFAH
NIM. 12070523824**

**PRODI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : PUTRI AFIFAH
 Nim : 12070523824
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Collaborative Governance Dalam Pengembangan Ekonomi Mikro
 Produksi Ikan Salai Di Kabupaten Kampar

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si
 NIP. 19860604 2023 21 1 026

Mengetahui

KETUA PRODI
 Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



Hery Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : PUTRI AFIFAH
Nim : 12070523824
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Collaborative Governance Dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Produksi Ikan Salai di Kabupaten kampar
Tanggal Ujian : Kamis, 11 Juli 2024

Tim Penguji

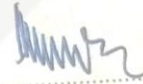
Ketua penguji
Dr. Khairunsvah Purba, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



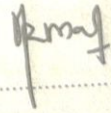
Penguji I
Afrizal, M.Si
NIP. 19690419 2007011025



Penguji II
Dra. Kafrina, M.Si
NIP. 196308101988032001



Sekretaris
Virna Museliza, M.Si
NIP. 196608272023212005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : PUTRI AFIFAH
 NIM : 12070523824
 Tempat/Tgl. Lahir : Bangkinang 107 Juli 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Collaborative Governance Dalam Pengembangan Ekonomi Mikro
 Produksi Ikan Salai di Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
 Yang membuat pernyataan



* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Penelitian ini fokus pada *Collaborative Governance* dalam pengembangan ekonomi mikro ikan salai di Kabupaten Kampar dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil wawancara mengenai kolaborasi antara PT, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta investor dijadikan indikator utama. Adanya diversitas pandangan stakeholder mencerminkan tantangan integrasi dan kolaborasi, terutama terkait regulasi yang kaku dan ketidakseimbangan sumber daya. Meskipun kepercayaan terhadap pemerintah tinggi, kekhawatiran terhadap regulasi berlebihan dapat menghambat tujuan kolaborasi. Faktor penghambat utama termasuk ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan antar stakeholder. Rekomendasi mencakup peningkatan kolaborasi, membangun kepercayaan, dan mengurangi hambatan regulasi untuk meningkatkan efektivitas pengembangan ekonomi mikro. Penelitian ini menggambarkan kondisi awal kolaborasi di Kabupaten Kampar dan faktor kunci untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam mendukung pengembangan ekonomi mikro di wilayah tersebut.

Kata kunci: *Collaborative Governance*, Pengembangan Ekonomi Mikro, Ikan Salai

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This research focuses on Collaborative Governance in the microeconomic development of smoked fish in Kampar Regency using descriptive qualitative methods. The results of interviews regarding collaboration between PT, the Minister of Maritime Affairs and Fisheries, and investors are used as the main indicators. The diversity of stakeholder views reflects the challenges of integration and collaboration, especially regarding rigid regulations and resource imbalances. Although trust in government is high, concerns about over-regulation can hinder collaborative goals. The main inhibiting factors include an imbalance of resources and knowledge between stakeholders. Recommendations include increasing collaboration, building trust, and reducing regulatory barriers to increase the effectiveness of microeconomic development. This research describes the initial conditions of collaboration in Kampar Regency and the key factors for increasing the effectiveness of collaboration in supporting the development of the micro economy in the region.

Keywords: Collaborative Governance, Microeconomic Development, Smoked Fish



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmananirrahim,

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat, dan hidayahnya kepada penulis. Shalawat beriringkan salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Collaborative Governance Dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Produksi Ikan Salai Di Kabupaten Kampar”**. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk pemenuhan sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Program Studi Sarjana S1 Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini penulis persembahkan teruntuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayah Jon Hendri S.Pd dan Ibu Nurasnah, yang selalu memberikan doa, perhatian, kasih sayang, bimbingan dan dukungannya baik secara moral maupun materil tanpa henti kepada penulis. Tidak lupa pula terima kasih kepada Saudara/i kandung dan kakak ipar penulis yaitu Wahyu Asmarandri S.Sos, Putri Annisa S.Farm dan Nur Asni S.Si yang telah memberikan semangat serta dorongan kepada penulis. Teruntuk ponakan tersayang Rafasya Alfariq terimakasih sudah menjadi *mood booster* bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada, yth:

1. Bapak Prof. Khairunnas, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Sultan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syarif Kasim Riau beserta staf.
2. Ibu Dr. Hj Mahyarni, SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.sos, M.Si, Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum, Ibu Dr.Hj. Julina, SE,M.Si selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos. M.Si selaku ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing proposal dan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasehat yang sangat berharga kepada penulis dalam proses penyusunan proposal dan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Semua Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang berguna untuk penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Semua Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Sahabat-sahabat saya Angel Fara Adila Harita, Indah Lestari dan Melvia Salsabilla. Terimakasih sudah menjadi teman terbaik selama menempuh perkuliahan ini dan mengajarkan banyak hal. Pengalaman yang luar biasa bersama kalian akan menjadi moment yang tidak terlupakan dan dirindukan. Semoga sukses untuk kita berempat.

10. Sahabat tercinta saya dari SMA hingga sekarang yaitu Lusiana Liandri yang selalu mensupport, juga memberikan dukungan baik berupa moril dan materi dan mendorong semangat penulis.

11. Terima kasih kepada semua teman-teman Administrasi Negara S1 kelas B dan juga seluruh teman-teman angkatan 2020 yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu yang telah berjuang bersama melewati proses perkuliahan demi mengejar gelar S.Sos.

Penulis sadar bahwasanya masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penulisan. Oleh sebab itu, penulis dengan terbuka serta senang hati menerima kritikan dan saran-saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini nantinya. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca.

Pekanbaru, 03 Me 2024

Putri Afifah

NIM : 12070523824

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Penulis	15
BAB II LANDASAN TEORI	16
2.1 Collaborative Governance	16
2.1.1 Model-Model Kolaborasi.....	18
2.1.2 Karakteristik Collaborative Governance.....	21
2.1.3 Faktor-Faktor Keberhasilan <i>Collaborative Governance</i>	22
2.2 Ekonomi Mikro	24
2.2.1 Pengembangan Ekonomi Mikro	25
2.4 Pandangan Islam	26
2.5 Kajian Terdahulu	27
2.6 Definisi Konsep	34
2.7 Konsep Operasional	36
2.8 Kerangka Berfikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	38
3.3 Jenis dan Sumber Data	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6 Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV GAMBARAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	44
4.1 Sejarah Kabupaten Kampar	44
4.2 Sejarah Singkat UPT Usaha Produksi Hasil Perikanan Kabupaten Kampar	46
4.3 Dasar Hukum UPT	48
4.4 Visi dan Misi UPT Usaha Produksi Hasil Perikanan Kabupaten Kampar	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Tugas dan Fungsi UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) Usaha Produksi Hasil Perikanan	49
4.6 Kondisi Sumber Daya Manusia.....	50
4.7 Struktur Organisasi UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) Usaha Produksi Hasil Perikanan	51
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	52
5.1 Kolaborasi Antara UPT (Unit Pelaksanaan Teknis), Menteri Kelautan dan Perikanan dan Investor Dalam Pengembangan Ekonomi Mikro Di Kabupaten Kampar.....	52
5.1.1.Kondisi Awal	53
5.1.2 Desain Kelembagaan.....	59
5.1.3 Kepemimpinan Fasilitas.....	66
5.2 Hambatan terhadap Kolaborasi antara UPT(Unit Pelaksanaan Teknis), Menteri Kelautan dan Perikanan dan Investor di Kabupaten Kampar.....	81
BAB VI PENUTUP	85
6.1 Kesimpulan	85
6.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Bahan Baku Suplai Ikan Dari Tahun 2020-2022	10
Tabel 1. 2 Data Produksi Olahan Ikan Salai Patin Dari Tahun 2020-2022	11
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 2. 2 Konsep Operasional	36
Tabel 4. 1 Kondisi SDM UPT Usaha Produksi Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.....	50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Collaborative Governance Ansell and Gash	21
Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir.....	37
Gambar 3. 1 Informan Penelitian	42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan. Pulau yang berkoordinat dan terdaftar di perserikatan bangsa-bangsa (PBB) melalui United Nations Groups of Experts on Geographical Names (UNGEGN) berjumlah 13.466 pulau. Jumlah ini dapat diperbarui setiap tahunnya melalui badan tersebut (Hadiaty, 2017).

Negara Indonesia saat ini masih digolongkan sebagai negara berkembang, oleh karena beberapa indikator yang menyatakan ketertinggalan negara Indonesia dibandingkan Negara-negara maju. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah (Putra, 2018). Setiap negara memiliki sumber daya alam, iklim maupun keadaan geografis yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya perbedaan kualitas maupun kuantitas produk serta komoditas yang dihasilkan. Secara langsung ataupun tidak langsung dengan adanya perbedaan tersebut akan mendorong terjadinya perbedaan persediaan barang dan jasa antar negara. Sehingga negara-negara di dunia perlu menjalin hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di tiap-tiap negara. Salah satu cara untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan oleh banyak negara adalah kegiatan ekspor dan impor (Pangesti, 2018).

Pemerintahan dituntut untuk selalu menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh lingkungannya. Penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk merespon perkembangan global yang terjadi di lingkungan internal maupun

lingkungan eksternal. Hal ini disebabkan karena perkembangan lingkungan yang semakin global menuntut peran-peran instansi pemerintah bisa mewadahi semua kepentingan dalam kerangka demokrasi (Irawan, 2017). Tantangan masa depan yang dihadapi dalam skala global adalah menyediakan sumberdaya hayati. Tantangan tersebut juga dialami oleh sektor perikanan. Di sisi lain, pertumbuhan populasi juga menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia (Aisyah, *et al*, 2019).

Berbagai kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dilakukan sebagai suatu usaha dan respon pemerintah dalam kegiatan penanganan masalah publik. Istilah kerja sama antar pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat diartikan sebagai *collaborative governance* (Irawan, 2017).

Collaborative Governance sudah menjadi istilah umum dalam administrasi public literatur, namun definisinya masih tidak berbentuk dan penggunaannya tidak konsisten (Emerson *et al.*, 2024). *Collaborative Governance* merupakan sebuah model pengendalian dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan stakeholders non-state dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi consensus, deliberatif dan bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program publik atau aset publik (Islamy, 2018). Menurut Fosler dalam Diani (2017), bahwa *collaborative governance* merupakan kerjasama kolaboratif yang melibatkan kerjasama antar pihak yang intensif, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan *elignment* dalam tujuan, strategi, agenda,

sumberdaya dan aktivitas. Kedua institusi yang ada, pada dasarnya memiliki tujuan yang berbeda membangun shared vision dan berusaha mewujudkannya secara bersama-sama.

Collaborative Governance merupakan dalam konteks Collaborative Governance, UPT dan investor sebagai pihak swasta dapat bekerja sama dalam pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah. Mereka dapat melakukan kolaborasi dalam merancang dan melaksanakan kebijakan publik, mengelola program, atau aset publik yang menguntungkan bagi stakeholder. Misalnya, UPT dan investor dapat bersama-sama mengembangkan proyek infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Kolaborasi ini memungkinkan adanya pemanfaatan sumber daya dari stakeholder, sehingga dapat mencapai hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Titik temu antara UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) dan Investor yaitu pada kegiatan monitoring pemanfaatan dan pengelolaan sentra, pengolahan hasil perikanan. Dan juga melakukan kegiatan musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) tingkat kecamatan untuk renovasi fasilitas yang digunakan untuk pengolahan ikan salai.

Aktor kolaborasi penelitian ini terdiri dari UPT Usaha Produksi Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, Menteri Kelautan dan Perikanan, Investor, dan juga Masyarakat. UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) sebagai lembaga dari pemerintah daerah sebagai penyedia fasilitas, pendampingan pelaksanaan kegiatan. Menteri kelautan dan perikanan sebagai pembinaan dan penyedia fasilitas

secara teknologi yang disediakan oleh pemerintah pusat, pengadaan anggaran mulai pembangunan sampai peralatan. Investor sebagai penyedia modal berupa pakan ikan dan pemasaran ikan segar. Dan kalau untuk masyarakat sebagai teknisi pengolah atau tenaga kerja dan pelaku usaha akan dimudahkan dalam melakukan kegiatan.

Dari pendapat diatas semakin mendukung analisis sehingga menemukan ada 3 (tiga) sektor yang terlibat dalam kolaborasi pengembangan ekonomi mikro produksi ikan salai, yakni pemerintah, swasta dan masyarakat lokal, yang telah kami analisis sebagai berikut :

Pemerintah, dalam menjalankan kolaborasi pengembangan ekonomi mikro produksi ikan salai tersebut, pemerintah tidak sendirian. Melainkan ada pihak swasta dan juga masyarakat yang ikut andil dan berperan terwujudnya program yang telah dirancang oleh pemerintah. Wujud dari adanya kolaborasi dalam pengembangan ekonomi mikro produksi ikan salai tersebut dapat dilihat dari pembagian kerja masing-masing pihak. Pihak pertama yang berperan tentu saja pemerintah. Peran dari pemerintah sendiri tidak jauh dari kebijakan, bagaimana agar kolaborasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. secara garis besar kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah demi menunjang kolaborasi tersebut berkaitan dalam pengembangan ekonomi mikro masyarakat sekitar. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat sekitar dampak, setidaknya dari segi ekonomi.

Swasta, peran dari sektor swasta tentu saja tidak jauh dari bisnis dan mencari keuntungan. Tetapi untuk untung ruginya, jika terdapat keuntungan pihak

swasta mendapatkan harga pakan, dan jika terjadi kerugian ditanggung oleh petani atau pembudidaya. Dalam kolaborasi yang dilakukan dalam pengembangan ekonomi mikro produksi ikan salai ini, pihak swasta bekerja sebagai penyedia modal berupa pakan ikan dan pemasaran ikan segar. Peran dari pihak swasta ini sangat penting, karena pihak swasta yang mengadakan penyedia modal pakan ikan yang di produksi.

Masyarakat, dalam kolaborasi ini peran masyarakat cukup besar, yaitu sebagai teknisi pengolah atau tenaga kerja dan selaku pelaku usaha akan dimudahkan dalam melakukan kegiatan. Dan jika tidak ada masyarakat tersebut maka kurang berjalannya yang di harapkan dari tujuan kolaborasi, karena tidak adanya tenaga kerja, dan masyarakat ini mendapatkan upah dan semakin banyaknya peluang kesempatan kerja.

Peran dari pemerintah, swasta dan masyarakat tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Mereka harus berjalan seringan dan saling memberikan dukungan. Peran dari pemerintah tersebut adalah dengan memfasilitasi swasta dan juga masyarakat yang berkolaborasi dalam pengembangan ekonomi mikro produksi ikan salai tersebut perlu mengikuti pelatihan dan pembinaan yang telah di sediakan oleh pemerintah menteri kelautan dan perikanan.

Mekanisme kolaborasi dalam pengembangan ekonomi mikro produksi ikan salai menawarkan potensi besar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara aktif dan setara, diharapkan produksi ikan salai dapat berkembang dengan optimal, meningkatkan kesejahteraan produsen lokal, dan

memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Dalam pengembangan ekonomi mikro produksi ikan salai, kolaborasi antara UPT (Unit Pelaksana Teknis) pemerintahan daerah, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Investor swasta, dan masyarakat sangat penting.

Berikut bentuk dan mekanisme kolaborasi yang terjadi dari pihak stakeholder yaitu yang pertama dengan adanya perencanaan bersama dialog dan konsultasi UPT menyelenggarakan forum dialog rutin yang melibatkan semua aktor untuk membahas rencana dan strategi pengembangan produksi ikan salai. Kesepakatan kerja sama, menyusun kesepakatan kerja sama yang jelas dan detail antara UPT, Kementerian kelautan dan perikanan, investor swasta, dan masyarakat. Yang kedua penyediaan fasilitas dan anggaran UPT mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur lokal dan bekerja sama dengan kementerian kelautan dan perikanan untuk pengadaanya dan menyediakan anggaran dan fasilitas teknologi yang diperlukan, serta memastikan pendistribusiannya tepat sasaran. Yang ketiga pelaksanaan dan pengawasan, pendampingan teknis UPT menyediakan pendampingan teknis kepada masyarakat selama proses produksi, melakukan monitoring berkala untuk menilai kemajuan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh para produsen, pelatihan dan pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pelatihan dan pembinaan rutin kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan teknis mereka. Yang ke empat pemasaran dan distribusi, kerjasama dengan investor, investor bekerja sama dengan masyarakat dan UPT untuk memastikan pakan tersedia tepat waktu dan pemasaran produk berjalan lancar atau tidak, sedangkan strategi pemasaran

investor menyusun strategi pemasaran yang efektif untuk memastikan produk ikan salai dapat diterima pasar dengan baik. Yang kelima evaluasi dan penyesuaian, melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk menilai efektivitas kolaborasi dan pencapaian target, penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi, melakukan penyesuaian strategi dan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kendala yang muncul dan meningkatkan hasil produksi, dan masyarakat bukan hanya sebagai pekerja tetapi juga memahami tentang produksi ikan salai yang dikembangkan, diberi upah melalui gaji yang diberikan oleh pihak pemerintah.

Maka dari itu mekanisme kolaborasi dalam pengembangan ekonomi mikro produksi ikan salai melalui pendekatan collaborative governance mengharuskan adanya sinergi yang kuat antara UPT pemerintahan daerah, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Investor swasta, dan Masyarakat. Melalui perencanaan bersama, penyediaan fasilitas dan anggaran yang memadai, pelaksanaan dan pengawasan yang efektif, serta strategi pemasaran yang tepat, diharapkan produksi ikan salai dapat berkembang dengan optimal dan berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pentingnya kolaborasi pada kasus ini terkait dari kemitraan dan kolaborasi, karena collaborative governance menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya dan distribusi produk. Dan juga dampak ekonomi mikro, karena pengembangan ekonomi mikro melalui produksi ikan salai dapat memberikan dampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Akses ke modal dari investor swasta

memungkinkan petani ikan untuk meningkatkan produksi, pendapatan mereka dan sebagai terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sebagai peningkatan kualitas prodak, kolaborasi dapat membantu dalam standarisasi kualitas prodak sehingga ikan salai yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang diterima di pasar, meningkatkan daya saing prodak, peningkatan jumlah pasar dan juga kolaborasi ini berpengaruh dalam memproduksi ikan salai karena akses pasar yang lebih luas melalui kolaborasi dengan sektor swasta, produsen ikan salai dapat memperoleh akses ke pasar yang lebih luas.

Upaya yang dilakukan dalam berkolaborasi untuk memproduksi ikan salai yaitu mencari peluang-peluang pasar dan meningkatkan kualitas prodak agar prodak yang dihasilkan bisa diterima oleh pihak lainnya, dan juga mempromosikan prodak-prodak yang ada melalui ekspo, pameran yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta. Dan sistem penjualan melalui kelompok masing-masing yang sudah ada di setiap kelompok, seperti penjualan ke agen-agen besar, pasar-pasar tradisonal dan kemasyarakat penjualan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan harga yang sama dengan pihak pembeli lainnya. Adapun kendala dalam berkolaborasi pada memproduksi ikan salai, dari pihak pemerintah untuk meningkatkan layanan untuk kualitas produk, kurangnya pendanaan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dari pemerintah, dan juga kurangnya regulasi untuk meningkatkan produksi, karena perlu adanya aturan-aturan yang melibatkan pemerintah dan legislasi daerah. Dari pihak investor swasta turunnya harga beli mengakibatkan kolaborasi dengan investor berkurang. Kolaborasi UPT

(Unit Pelaksanaan Teknis), Menteri kelautan dan perikanan, dan juga investor malaysia mengelola ikan salai yang berupa ikan patin.

Adapun UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) usaha produksi hasil perikanan ini milik Pemda (Pemerintah Daerah) atau Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, dan sentra sebagai pusat pengolahan yang didirikan pemerintah untuk menyatukan pengolahan di satu tempat.

Pelestarian Sumber Daya Ikan menurut Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan adalah upaya perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjaga ketersediaan keberadaan, dan keberlanjutannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Ikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ikan patin atau ikan air tawar (Fahrika, 2023). Pemacuan sumber daya ikan pada umumnya ditujukan untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan atau memperbaiki populasi ikan apabila populasi ikan di perairan menurun. Pemacuan sumber daya ikan juga dimaksudkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas stok ikan yang memijah sehingga memperbaiki potensi reproduksi alaminya (Kartamihardja, *et al*, 2008).

Ikan patin (*Pangasius*) merupakan salah satu spesies ikan air tawar yang potensial untuk dibudidayakan karena memiliki performa reproduksi yang baik, salah satunya yaitu fekunditas tinggi. Ikan patin memiliki berbagai keunggulan sebagai ikan budidaya karena pertumbuhannya cepat, fekunditas tinggi, serta dapat dipijahkan secara massal (Ritonga, 2023). Ikan patin menjadi salah satu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komoditas unggulan di bidang perikanan. Ikan air tawar yang memiliki warna putih keabu-abuan ini, memiliki cita rasa yang khas dan mengandung protein cukup tinggi. Ikan patin menjadi salah satu komoditas unggulan di bidang perikanan. Ikan air tawar yang memiliki warna putih keabu-abuan ini, memiliki cita rasa yang khas dan mengandung protein cukup tinggi (Fariedah, 2018).

Ikan patin merupakan salah satu ikan air tawar yang cukup dikenal di Indonesia, serta mempunyai nilai ekonomis. Rasa dagingnya yang lezat dan gurih sehingga digemari oleh masyarakat. Ikan patin banyak dijumpai di provinsi Riau. Dulunya ikan ini hanya ada di daerah aliran sungai indragiri, sungaisiak, sungai kampar dan sungai rokan. Ikan patin yang asli berasal dari sungai dan memiliki aroma khas (Andriani, 2014).

Data bahan baku ikan patin UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) Dinas Perikanan Desa Koto Masjid dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami ketidakstabilan bahan baku ikan salai dan naik turunnya bahan baku ikan salai tersebut diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti bahan baku ikan patin yang rentan dengan berbagai risiko, kebutuhan itu permintaan yang meningkat, sementara kolam ikan tetap itu juga jadi mengakibatkan banyaknya ikan patin yang mati, hingga berbagai faktor lainnya. Hal ini tentunya mengganggu permintaan konsumen yang selalu meningkat.

Tabel 1. 1 Data Bahan Baku Suplai Ikan Dari Tahun 2020-2022

NO	Nama Kelompok	Jumlah (kg) 2020	Jumlah (kg) 2021	Jumlah (kg) 2022
1	Mitra Salai	153.785	144.585	46.905
2	Kim Salai	167.795	83.595	-
3	Salai Dua Putri	164.445	215.685	225.930
4	Rezky Salai	188.252	215,605	252.810
5	Arios Fish	146.915	126.175	142.855

NO	Nama Kelompok	Jumlah (kg) 2020	Jumlah (kg) 2021	Jumlah (kg) 2022
6	Wali Salai	152.405	201.393	262.850
7	Acu Ghali Salai	186.692	116.425	266.245
8	Putra Agung	164.090	211.370	129.600
9	One Fish Salai	136.540	223.430	164.370
10	Qintan A.S	80.365	1.980	-
	Jumlah Total	1.541.284	1.540.243	1.491.565

Sumber: UPT Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Keamatan XIII Koto Kampar, 2023.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2020-2022 mengalami ketidak stabilan suplai ikan bahan baku. Penyebab ketidak stabilan karna adanya faktor seperti bahan baku ikan patin yang rentan dengan berbagai risiko, kebutuhan itu permintaan yang meningkat, sementara kolam ikan tetap itu juga, jadi mengakibatkan banyaknya ikan patin yang mati, hingga berbagai faktor lainnya.

Tabel 1. 2 Data Produksi Olahan Ikan Salai Patin Dari Tahun 2020-2022

NO	Nama Kelompok	Jumlah (kg) 2020	Jumlah (kg) 2021	Jumlah (kg) 2022
1	Mitra Salai	44.598	41.930	13.602
2	Kim Salai	48.661	24.243	-
3	Salai Dua Putri	47.689	69.219	94.520
4	Rezky Salai	54.593	91.525	105.505
5	Arios Fish	42.605	36.881	41.428
6	Wali Salai	44.197	87.694	105.227
7	Acu Ghali Salai	54.141	81.763	106.211
8	Putra Agung	47.586	61.964	66.584
9	One Fish Salai	39.597	82.195	105.696
10	Qintan A.S	23.106	574	-
	Jumlah Total	446.773	577.985	638.773

Sumber: UPT Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Keamatan XIII Koto Kampar, 2023.

Permasalahan saat ini adalah dapat dilihat dari, yang pertama unit pengolahan limbah atau ipal belum ada sehingga sisa hasil proses pengolahan berupa kotoran dan jeroan belum dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik,

yang kedua penerapan GMP dan SSOP dalam proses pengolahan ikan belum sepenuhnya diterapkan oleh pengolah. Adapun GMP merupakan manajemen standar yang dilakukan oleh pemerintah sedangkan SSOP yaitu prosedur pelaksanaan sanitasi dan pengendalian proses dalam program sanitasi. Investor swasta menyediakan bahan baku ikan salai patin dan memasarkan ikan segar. Namun, data dari UPT menunjukkan ketidakstabilan pasokan bahan baku dari tahun 2020 hingga 2022. Meskipun produksi olahan ikan salai patin meningkat selama periode tersebut, proses produksi hingga distribusi atau pemasaran terganggu, yang berpotensi menurunkan pendapatan.

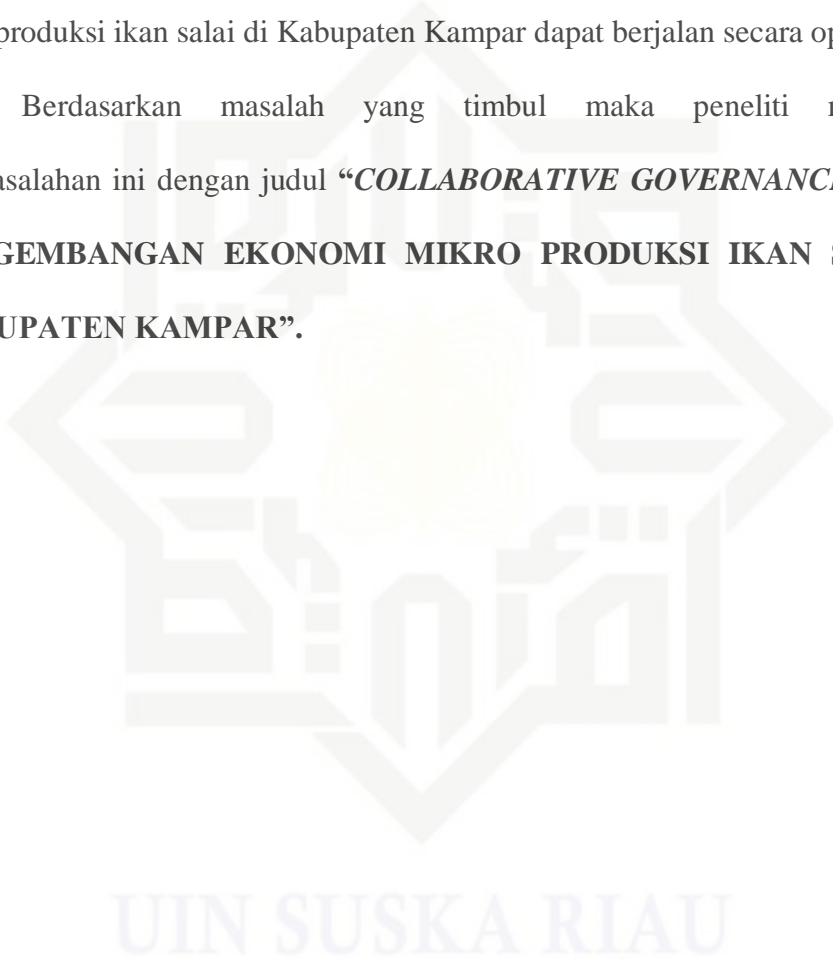
Dari beberapa kendala diatas juga terdapat fenomena yang ada pada kolaborasi antara UPT Usaha Produksi Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan juga Investor dalam memproduksi ikan salai yaitu kebutuhan dibawah kelompok UKM, kadang tidak sesuai dengan apa yang ada di swasta atau pemerintahan pusat.

Alasan penelitian ini memilih ikan patin karena, Kabupaten kampar telah ditetapkan sebagai kawasan sentra Produksi Perikanan Air Tawar di Provinsi Riau melalui surat keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS. 999/II/2000 tanggal 28 Februari 2000. Dan juga desa Koto Masjid merupakan penghasil ikan patin terbesar di riau, ikan patin merupakan budidaya perikanan yang sangat cocok dikembangkan di daerah ini. Maka dari itu ciri khas dari daerah kampar terkhususnya desa koto masjid adalah ikan salai patin. Potensi pengembangan usaha perikanan di Kabupaten Kampar cukup luas dan mempunyai peluang yang

cukup besar untuk dikembangkan. Bahwa Desa Koto Mesjid memiliki bahan perikanan kolam sebanyak 389 unit kolam dengan luas 26 hektar.

Uraian permasalahan diatas menyebabkan penelitian ini penting untuk dilakukan agar Collaborative Governance dalam pengembangan ekonomi mikro pada produksi ikan salai di Kabupaten Kampar dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan masalah yang timbul maka peneliti mengangkat permasalahan ini dengan judul **“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MIKRO PRODUKSI IKAN SALAI DI KABUPATEN KAMPAR”**.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di atas, maka yang akan menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kolaborasi antara UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) Usaha Produksi Hasil Perikanan Dinas Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Investor Malaysia dalam pengembangan ekonomi mikro di Kabupaten Kampar?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam kolaborasi pengembangan ekonomi mikro di Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kolaborasi antara UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) Usaha Produksi Hasil Perikanan Dinas Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Investor Malaysia dalam pengembangan ekonomi mikro di Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam kolaborasi pengembangan ekonomi mikro di Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi sarana dalam mendapatkan jawaban atas fenomena yang terjadi.
2. Bagi akademis, yaitu sebagai bahan referensi dalam proses pengembangan teori dan konsep terutama terkait perkembangan ilmu administrasi negara fakultas ekonomi dan ilmu sosial.

3. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi peneliti lainnya yang melakukan penelitian dengan kajian yang sama pada masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulis

Sistematika penulis ini untuk mempermudah pembahasan dan pengertian dari penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada Bab II ini berisi tentang teori-teori, referensi yang bersumber dari buku, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab III ini penulis memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan yang berisi tentang Jenis Penelitian lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Informan Penelitian dan Teknik Analisa Data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Collaborative Governance

Menurut McGuire mengutip pendapat Frederikson dalam Noor 2022, menggunakan “collaboration” untuk mengelola hubungan antar pemerintah dan organisasi. Dalam literatur administrasi publik, istilah “governance” sering digunakan untuk menjelaskan serangkaian organisasi yang saling berhubungan dan terlibat dalam kegiatan publik, memperluas dan merubah domain pemerintah. Lebih dari itu Frederikson mengatakan bahwa governance mengandung arti lebih dari lembaga publik yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, yang menunjukkan menurunnya hubungan antara yurisdiksi dan manajemen publik.

Menurut Ansell dan Gash dalam Islamy 2018, *Collaborative Governance* adalah Suatu pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang Bahan dengan hal bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif dan bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.

Emerson *et al* dalam Saputra 2020, *Collaborative Governance* didefinisikan sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibat-kan orang-orang secara konstruktif pada batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan masyarakat, swasta dan sipil untuk

melaksanakan kepentingan banyak bersifat umum yang tidak bisa di ciptakan jika di lakukan dengan satu pihak.

Menurut Agranoff & McGuire dalam Chang dalam Danastry 2021, mengartikan collaborative governance sebagai bentuk kolaborasi atau kerja sama secara horizontal dengan para pelaku multi sektoral. Pada proses kolaborasi seringkali tuntutan klien melebihi batas kapasitas dan peran organisasi, dengan adanya hal tersebut maka diperlukan kerja sama antar organisasi yang terlibat. Kolaborasi mempunyai tujuan, yaitu agar governance menjadi lebih terstruktur dan efektif dalam meningkatkan pengelolaan lintas sektor pemerintah, organisasi publik atau private dan pembagian wewenangnya.

Mengacu dari berbagai pengertian yang dijelaskan mengenai collaborative governance, dapat diterangkan bahwa pada dasarnya kebutuhan untuk berkolaborasi muncul dari hubungan saling ketergantungan yang terjalin antar pihak atau antar stakeholders. Collaborative governance dapat diterangkan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Melalui perspektif collaborative governance, tujuan-tujuan positif dari masing-masing pihak dapat tercapai (Irawan, 2017).

Menurut para ahli diatas dapat disimpulkan *collaborative governance* adalah suatu pendekatan dalam pengaturan pemerintahan dimana lembaga publik melibatkan pemangku kepentingan non negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal dan berorientasi pada konsensus untuk melaksanakan kebijakan publik atau mengelola aset publik.

2.1.1 Model-Model Kolaborasi

Menurut Quade dalam Islamy 2018, Model merupakan abstraksi dunia nyata, substitusi, atau representasi realita dalam bentuk peta, diagram organisasi, persamaan matematika dan lain-lain. Model digunakan untuk membantu saat berhadapan dengan fenomena nyata yang kompleks dan mahal jika dikaji secara langsung.

Model dapat diklasifikasi:

1. Model Eksplisit eksplanatoris yang mendeskripsikan gambaran suatu dunia nyata
2. Model implisit yang bersifat mental (mental model).

Beberapa klasifikasi model yang termasuk kedalam model yang eksplanatoris-prediktif adalah model analitis, model simulasi, gaming model, model judgment, model skematik, dan model fisik. Adanya interdependensi tersebut, *collaborative governance* merupakan gaya yang berupaya memudahkan kompleksitas penyatuan antar pemerintah, stakeholder, swasta, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama yang berorientasi konsensus.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti mencoba menyajikan sejumlah model *collaborative governance* yang dikemukakan para ahli:

1. Model Ansell and Gash

Model ini memiliki empat variabel yang dijadikan pusat perhatian yaitu: Kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Masing-masing variabel tersebut dapat diperkecil lagi menjadi sub-sub variabel. Untuk variabel proses kolaborasi, merupakan inti dari model ini.. Sedangkan

kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan dipresentasikan sebagai pendukung yang memberikan kontribusi penting dalam proses kolaborasi. Desain kelembagaan dapat berfungsi sebagai aturan dasar dalam melaksanakan kolaborasi, dan kepemimpinan sebagai mediator sekaligus fasilitator dalam kolaborasi (Ansell dan Gash dalam islamy, 2018).

Untuk lebih jelasnya variable tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kondisi Awal

Dari berbagai literatur mengungkapkan bahwa banyaknya proses kolaborasi yang gagal dikarenakan perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan dan stakeholder, perbedaan pandangan tersebut berdasarkan pengalaman pahit yang pernah dialami oleh stakeholder dimana munculnya isu local emotional yang mempengaruhi kepercayaan dan saling mencurigai satu sama lain, sehingga muncul anggapan bermusuhan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka Ansell and Gash merangkum permasalahan tersebut menjadi tiga Variabel yaitu:

- Adanya ketidak seimbangan sumber daya dan pengetahuan antar pelaku kolaborasi
- Harus ada insentif yang jelas dalam berkolaborasi
- Adanya ketakutan akan terjadinya konflik jika kolaborasi dilaksanakan.

b. Desain Kelembagaan

Dengan memperhatikan partisipasi forum kolaborasi kelembagaan, aturan-aturan dasar yang mendukung kolaborasi, serta proses penyelenggaraan kolaborasi yang transparan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kepemimpinan Fasilitatif

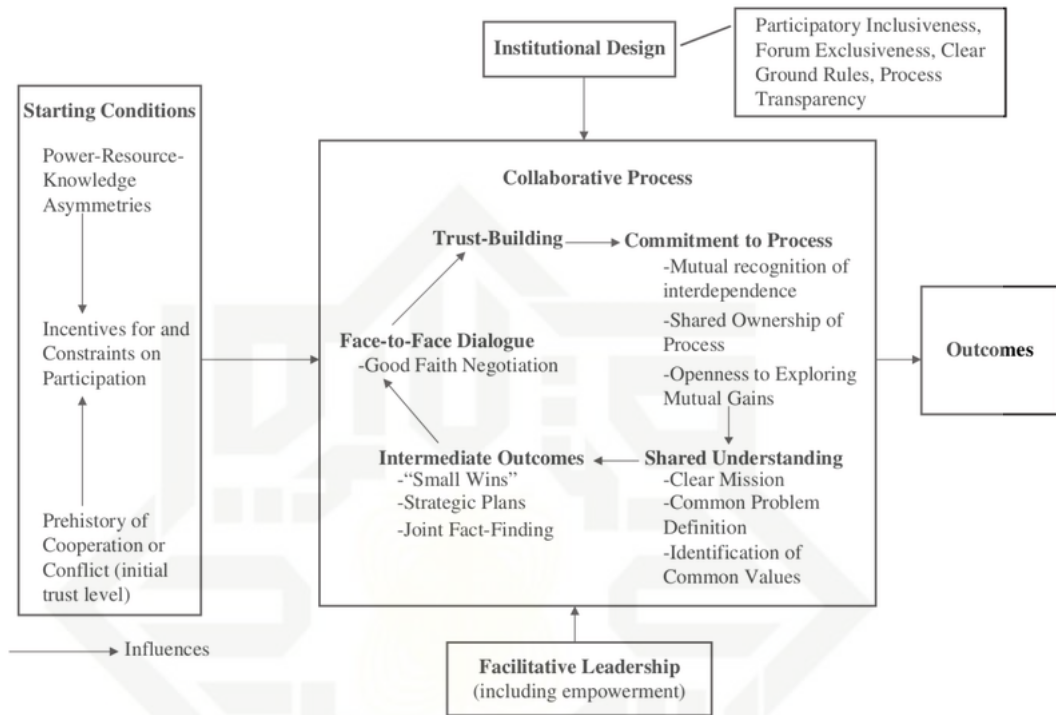
Kepemimpinan Fasilitatif secara luas dapat dilihat sebagai unsur penting dalam membawa semua pihak ke meja perundingan untuk mengarahkan mereka melakukan perundingan-perundingan dan negosiasi guna mencegah masalah yang mungkin akan timbul dalam proses kolaborasi.

d. Proses Kolaborasi

Proses Kolaborasi, dalam hal ini kolaborasi yang dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bagaimana membangun kepercayaan antar peserta kolaborasi
- Bagaimana membangun komitmen dalam proses kolaborasi
- Berbagi pemahaman tentang misi dan permasalahan yang dihadapi, serta mengidentifikasi nilai-nilai umum dalam kolaborasi
- *Intermediate outcomes*, dengan melihat bagaimana meraih kesuksesan awal, melakukan perencanaan stratejik, dan penemuan fakta-fakta secara bersama
- *Face to face dialogue* dalam hal ini melakukan negosiasi dengan itikad yang baik.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 1 Model Collaborative Governance Ansell and Gash

2.1.2 Karakteristik Collaborative Governance

Menurut Ansell & Gash dalam Islamy 2018, dimana mereka merumuskan enam aspek kunci yang menjadi karakteristik Collaborative Governance yakni:

1. Adanya forum yang diinisiasi atau melibatkan lembaga publik maupun aktor-aktor yang menjadi bagian lembaga publik secara formal
2. Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk aktor non publik/pemerintah
3. Peserta yang terlibat memiliki andil langsung dalam pengambilan keputusan serta pembuatan kebijakan dan keputusan/kebijakan tersebut tidak harus merujuk pada aktor-aktor publik
4. Forum terorganisasi secara formal dan pertemuan diadakan bersama-sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama atau konsensus
6. Kolaborasi berfokus pada kebijakan dan manajemen publik (pengelolaan aset, program, dan sebagainya).

2.1.3 Faktor-Faktor Keberhasilan *Collaborative Governance*

Menurut DeSeve dalam Danastry (2021), membagi delapan aspek yang mempengaruhi keberhasilan praktek kolaborasi dalam *governance*, yaitu:

a. Networked Structure (Struktur Jaringan)

Networked Structure (struktur jaringan) adalah keterkaitan antar elemen yang saling menyatu dan mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang dikelola. Pada pelaksanaan *collaborative governance* tidak disarankan untuk membentuk hierarki atau kekuasaan satu pihak.

b. Commitment to A Common Purpose (Komitmen pada Tujuan Bersama)

Adalah tujuan dari terbentuknya *network* atau jaringan adalah untuk memegang komitmen dalam mencapai tujuan-tujuan yang akan dilakukan antar pihak.

c. Trust Among the Participants (Kepercayaan diantara Peserta)

Adalah ikatan antar pihak dalam hal profesional, sosial, dan memiliki keyakinan untuk saling percaya pada informasi-informasi atau usaha-usaha pemangku kepentingan lainnya dalam satu jaringan dalam mencapai tujuan bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Governance (Tatakelola)

Adalah sebuah ikatan saling percaya diantara para pemangku kepentingan. Terdapat pula aturan yang telah disepakati serta terdapat kebebasan untuk menentukan strategi kolaborasi dijalankan.

e. Access to Authority (Akses ke Otoritas)

Merupakan kesempatan atau ketersediaan hak mengenai pelaksanaan prosedur yang jelas dan dapat diterima oleh semua pihak tanpa membeda-bedakan masing-masing stakeholders.

f. Distributive Accountability/ Responsibility (Akuntabilitas/ Tanggung jawab distributif)

Merupakan pengelolaan atau manajemen yang dilakukan antar stakeholders untuk berbagi dalam proses pengambilan keputusan dan berbagi tanggung jawab untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.

g. Information Sharing (Berbagi Informasi)

Merupakan kemudahan akses bagi para stakeholders dalam proses pelaksanaan kolaborasi, mendapatkan perlindungan data pribadi, dan pembatasan akses bagi non anggota.

h. Access to Resources (Akses ke Sumber Daya)

Dalam pelaksanaan praktek kolaborasi untuk mencapai tujuannya selain diperlukan sumber daya manusia, maka diperlukan pula ketersediaan sumber keuangan, teknis, dan sumber daya lainnya yang diperlukan oleh masing-masing stakeholders yang terlibat.

2.2 Ekonomi Mikro

Ekonomi Mikro adalah cabang yang berfokus pada bagaimana individu, rumah tangga, dan organisasi membuat keputusan mereka untuk mendistribusikan sumber daya yang terbatas, biasanya di pasar yang melihat perdagangan barang atau jasa. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana keputusan-keputusan ini mempengaruhi umum pasokan dan permintaan untuk komoditas dan jasa. Seperti kita ketahui, pasokan adalah salah faktor yang menentukan harga, yang pada gilirannya, menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Ekonomi Mikro biasa juga disebut sebagai pandangan “bottom-up economy” (perekonomian dari bawah ke atas), atau bagaimana orang berurusan dengan uang, waktu, dan sumber daya yang tersedia (Yunani, 2018).

Pendekatan Ekonomi Mikro, melihat aktivitas atau perilaku ekonomi secara individual, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit ekonomi kecil. Misalnya dilakukan oleh perseorangan, perusahaan tertentu, pedagang tertentu, rumah tangga tertentu dan yang sejenisnya. Ibarat melihat sebuah hutan, yang dilihat detail ialah dari tumbuh-tumbuhan yang ada didalamnya (Yunani, 2018).

Ekonomi mikro merupakan suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang sifatnya menganalisis mengenai bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Adapun isu pokok yang dianalisis meliputi bagaimana caranya menggunakan faktor produksi yang ada secara efisien supaya kemakmuran masyarakat dapat dimaksimalkan. Teori ekonomi mikro analisisnya dapat dibuat berdasarkan pemikiran antara lain sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kebutuhan dan keinginan manusia jumlahnya sangat tidak terbatas.
2. Kemampuan dari faktor produksi dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sifatnya terbatas.

Perlu diketahui bahwa salah satu tujuan dari ekonomi mikro adalah menganalisa pasar beserta mekanismenya yang dapat membentuk harga secara relatif kepada produk dan jasa yang ada, dan mengalokasikan sumber yang terbatas diantara banyak penggunaan alternatif pemenuhan kebutuhan (Hidayati, 2019).

2.2.1 Pengembangan Ekonomi Mikro

Dalam buku Arwin 2020, Mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi dan unit unit ekonomi individual, yaitu individu sebagai konsumen, individu sebagai pemilik faktorproduksi, maupun individu sebagai produsen, termasuk permintaan dan penawaran hingga struktur pasar, semuanya merupakan analisa ekonomi dalam konteks mikro. Analisa ekonomi mikro dapat dibagi menjadi tiga, yaitu teori harga, teori produksi, dan teori distribusi.

- a. Teori harga antara lain membahas tentang proses pembentukan harga sebagaimana dipengaruhi oleh interaksi antara penawaran dan permintaan akan sesuatu barang dan jasa didalam suatu pasar, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran, hubungan antara harga permintaan dan penawaran, bentuk-bentuk pasar, menganalisis tentang konsep elastis permintaan atau elastis penawaran dan sebagainya.
- b. Teori produksi antara lain menganalisa tentang masalah biaya produksi, tingkat produksi yang paling menguntungkan bagi produsen, serta kombinasi faktor-

faktor produksi yang harus dipilih oleh produsen agar tujuan untuk mencapai laba maksimum tercapai.

- c. Teori distribusi membahas tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat upah tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayar karena penggunaan modal, dan tingkat keuntungan yang diperoleh para pengusaha.

2.4 Pandangan Islam

Islam tidak pernah membatasi umatnya dalam melakukan aktivitas ekonomi, namun kebebasan manusia untuk menciptakan peradaban ekonomi yang baik tentu tidak boleh melanggar pokok-pokok aturan yang telah ditetapkan Allah swt. Ekonomi mikro Islam menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel yang utama. Salah satu tujuan ekonomi mikro Islam adalah menerapkan prinsip ekonomi mikro Islam dalam pengambilan keputusan untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengabaikan kemaslahatan umum.

Dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah swt menegaskan tentang pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi dengan keadilan dan menghindari praktik yang tidak benar. Prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam sejalan dengan pesan ini, mengingatkan bahwa kebebasan manusia dalam beraktivitas ekonomi harus selaras dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel utama dalam pengambilan keputusan ekonomi, umat Islam diarahkan untuk tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, tujuan ekonomi mikro Islam adalah untuk menciptakan sebuah peradaban ekonomi yang

berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٠

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa' · Ayat 29)

Ayat ini menekankan prinsip-prinsip etika dalam ekonomi mikro, terutama terkait dengan keadilan dalam berdagang dan menjaga kehidupan. Dalam konteks ekonomi mikro, ayat ini mengajarkan agar umat beriman tidak memperoleh harta dengan cara yang tidak benar, seperti penipuan atau penyalahgunaan kepercayaan. Hal ini mencerminkan pentingnya transaksi yang adil dan jujur dalam berdagang, yang merupakan prinsip inti dalam ekonomi mikro. Dengan demikian, hubungan antara ayat ini dengan ekonomi mikro adalah bahwa ayat tersebut menegaskan prinsip-prinsip etika, keadilan, dan kehati-hatian dalam melakukan transaksi ekonomi serta pentingnya menjaga kehidupan dan kesejahteraan bersama dalam konteks aktivitas ekonomi individu.

2.5 Kajian Terdahulu

Ada beberapa judul penelitian mahasiswa atau mahasiswi sebelumnya, yang dalam penulisan ini dijadikan sebagai kajian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Aldhira Gusmiara Dasnastry, 2021	Tata Kelola Kolaboratif pada Penetrasi Jaringan Fixed Broadband di Indonesia	Hasil dari penelitian ini proses tata kelola kolaborasi dapat diterapkan dalam program penetrasi fixed broadband walaupun di beberapa daerah terdapat perbedaan pola perilaku dan kapasitas kemampuan sumber daya manusianya. Sangat diperlukan adanya keterbukaan dan hubungan yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk dapat mewujudkan tata kelola kolaborasi dalam program penetrasi fixed broadband. Kontribusi dalam penelitian ini adalah adanya proses kolaborasi yang baik antara sektor publik (Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pariwisata, dan	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tata kelola kolaboratif pada penetrasi jaringan <i>fixed broadband</i> di Indonesia. Studi kasus digunakan untuk menganalisis penerapan tata kelola kolaboratif dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan tata kelola kolaboratif pada penetrasi jaringan <i>fixed broadband</i> di Indonesia. Tata kelola kolaboratif termasuk proses, struktur, dan dinamika pengambilan keputusan dan koordinasi, lintas organisasi dan batas sektoral termasuk masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			Kementrian, Desa PDT), sektor swasta (Telkomsel) dan Masyarakat dalam tata kelola kolaborasi dalam program penetrasi fixed broadband.	
2	Rintan Mirza Diani <i>et al</i> , 2017	Analisis Penerapan <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour	Hasil dari penelitian ini urusan publik yang semakin rumit, memaksa pemerintah untuk melaksanakannya tata kelola kolaboratif dengan pihak-pihak yang terlibat. Salah satu tindakan implementasi tata kelola kolaboratif terlihat melalui pengelolaan Lava Tour di Merapi. Pemerintah harus bekerja sama dengan swasta, dan juga dengan masyarakat. Penelitian ini menjelaskan lebih lanjut tentang bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.	Konsep mengenai collaborative governance itu sendiri telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli, salah satunya adalah menurut Fosler (2002) bahwa collaborative governance merupakan kerjasama kolaboratif yang melibatkan kerjasama antar pihak yang intensif, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan elignment dalam tujuan, strategi, agenda, sumberdaya dan aktivitas. Kedua institusi yang ada, pada dasarnya memiliki tujuan yang berbeda membangun shared

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
				vision dan berusaha mewujudkannya secara bersama-sama. Kemudian Sink (1998) menjelaskan bahwa kerjasama kolaboratif sebagai sebuah proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap satu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri.
3	Denny Irawan, 2017	<i>Collaborative Governance</i> (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya)	Hasil dari penelitian ini proses pemerintahan kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Surabaya yang melalui tiga tahapan yaitu Identifying Obstacles and Opportunities, Debating Strategies for Influence, dan Planning	Pemahaman perspektif good governance bagi setiap orang berbeda-beda, namun bagi sebagian besar masyarakat membayangkan mereka akan mendapatkan pemerintahan yang baik, maka kualitas kebijakan publik dan pelayanan publik semakin lebih baik,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			<p>Collaborative Actions belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari kriteria pemerintahan kolaboratif yang masih belum terpenuhi terutama kriteria Distributive Accountability dan Acces to Resources pada tahap Debating Strategies for Influence. Kriteria tersebut menunjukkan kurangnya keterlibatan stakeholders lain di dalam forum kolaborasi, dan ketersediaan sumber keuangan yang masih belum mencukupi. Pada kriteria ketersediaan sumber daya keuangan masih menjadi kendala utama karena minimnya penyediaan anggaran yang diatur dalam RAPBD untuk penenganan masalah</p>	<p>dan pemerintah akan semakin peduli dengan kepentingan masyarakat. Kemudian akan mempercayai kualitas kinerja dari pemerintah</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			pencemaran uadara di Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan masih kurangnya komitmen dari pemerintah.	
4	Deden Saputra, 2020	Tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat	Hasil dari penelitian ini kerja sama yang terjadi belum seutuhnya menjalankan prinsip kolaborasi, dan proses kolaborasinya tidak brjalan secara bersinergi. Hasil penelitian menunjukkan stakeholder yang berperan dalam pengembangan secara langsung adalah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, lurah Patehan, akademisi, pengelola kampung wisata, dan pelaku/penyedia jasa wisata. Pola kerjasama pihak pemerintah dengan masyarakat berupa pembinaan, dan kerjasama pihak	Pemerintah dinas pariwisata kota Yogyakarta dan Lurah Patehan berpartisipasi dalam kolaborasi untuk pengembangan kampung wisata ini dengan tujuan mencapai visi bersama dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pariwisata. Untuk tujuan pihak akademisi berpartisipasi adalah mendukung kebijakan pemerintah dengan melakukan program terkait pengembangan kampung wisata Tamansari.

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			akademisi dengan masyarakat berupa pengkajian. Kepemimpinan fasilitatif dan kelembagaan yang eksklusif menjadi faktor penghambat proses kolaborasi pengembangan kampung wisata Tamansari.	
5	Dimas Luqito Chusuma Arrozaaq	<i>COLLABORATIVE GOVERNANCE</i> (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)	Hasil dari Penelitian ini menjelaskan proses kolaborasi yang terjalin antara pemerintah, swasta dan komunitas dalam rezim pemerintahan kolaboratif (CGR). Penelitian ini menemukan bahwa proses kolaborasi dalam pengembangan minapolitan di kawasan Sidoarjo telah berjalan dengan baik berjalan cukup baik. Karena kolaborasi ini dimulai melalui keterlibatan yang berprinsip,	Dampak dalam CGR yang dimaksud adalah dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi. Karakteristik dampak ada yang diharapkan, yang tidak diharapkan, serta tidak terduga. Dampak yang diharapkan adalah “small-wins” yaitu hasil-hasil positif yang terus memberlangsungkan semangat para aktor. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan seperti kendala-kendala dalam pelaksanaan kolaborasi. Dampak tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			<p>motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama. Penelitian ini juga menemukan bahwa kendala dalam pelaksanaan kerjasama antara lain : tantangan dalam pembentukan kelompok usaha menjadi badan hukum entitas, kurangnya kesinambungan kolaborasi, terbatasnya peran pemerintah dalam memfasilitasi alternatif pemasaran kelompok usaha, dan terakhir, kurangnya keterlibatan pihak swasta dalam seluruh kegiatan kolaborasi.</p>	<p>terduga juga dapat muncul secara langsung maupun tidak pada proses kolaborasi.</p>

Sumber : Olahan Penulis

2.6 Definisi Konsep

Berdasarkan uraian diatas dapat dibuat definisi konsep yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Collaborative yaitu mengacu pada tindakan bekerja sama dengan untuk mencapai tujuan atau hasil bersama. Ini melibatkan individu atau kelompok



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyatukan sumber daya, keahlian dan upaya untuk menyelesaikan tugas, memecahkan masalah, atau menciptakan sesuatu secara kolektif.

2. Governance merujuk pada proses dan sistem yang digunakan untuk mengelola, mengawasi, dan mengatur suatu entitas atau organisasi. Governance dapat berlaku dalam berbagai konteks, termasuk pemerintahan suatu negara, perusahaan atau organisasi internasional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan akuntabilitas, keadilan keberlanjutan, dan keputusan terhadap hukum serta regulasi yang berlaku.
3. Collaborative Governance yaitu pendekatan dalam pengelolaan yang melibatkan kerjasama antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama dengan partisipasi, keterbukaan, dan kesepakatan bersama dalam proses pengambilan keputusan.
4. Pengembangan yaitu merujuk pada proses atau tindakan untuk meningkatkan atau memperluas kemampuan, keterampilan, pengetahuan, atau sumber daya suatu individu, organisasi atau sistem. Tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan, atau inovasi yang lebih baik, baik dalam konteks individu maupun entitas yang lebih besar.
5. Ekonomi Mikro adalah mempelajari perilaku ekonomi individual, rumah tangga, dan perusahaan dalam alokasi sumber daya yang terbatas. Fokus utama ekonomi mikro adalah pada entitas ekonomi kecil dan bagaimana keputusan yang dibuat memengaruhi alokasi sumber daya dalam suatu ekonomi.

2.7 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut (Reski, 2022).

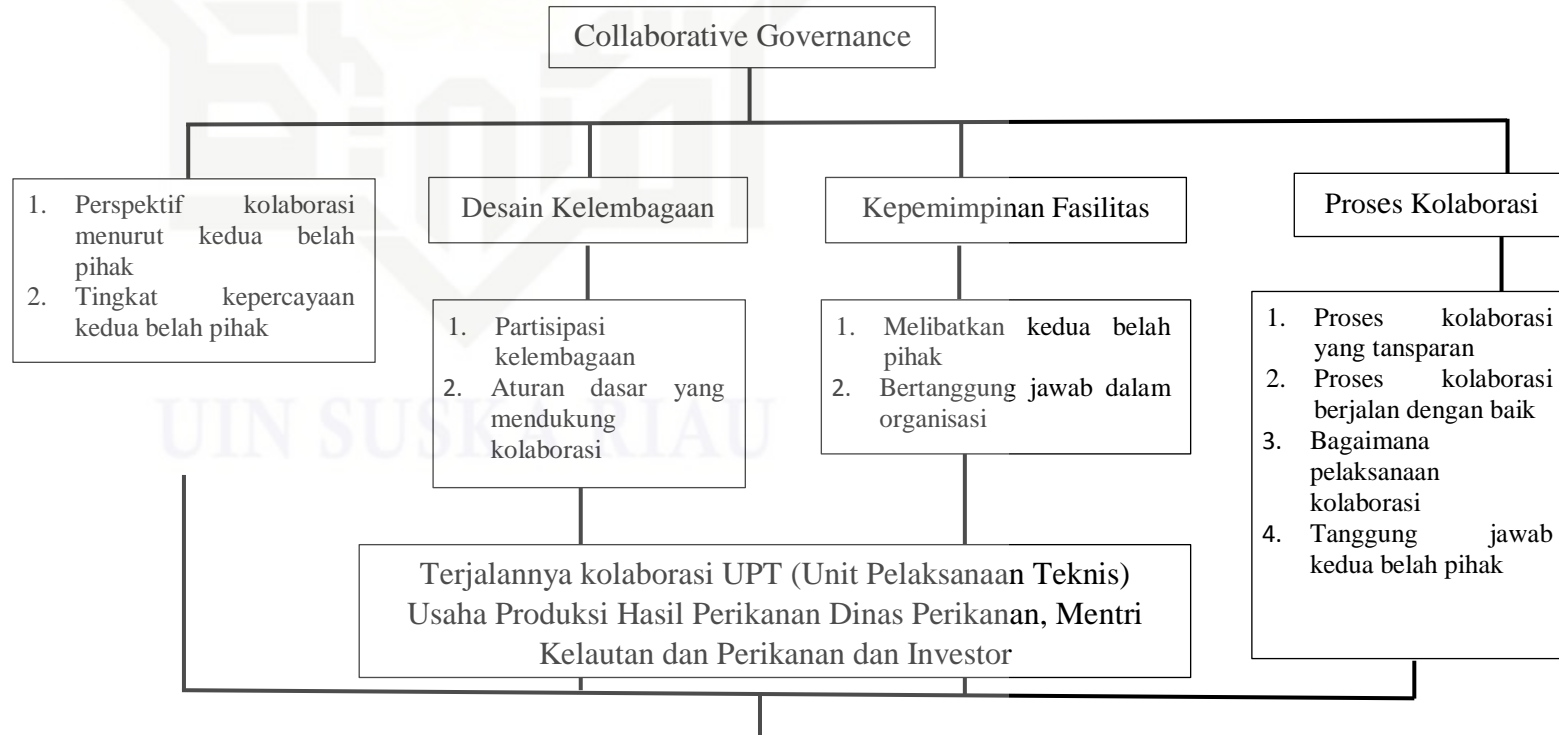
Tabel 2. 2 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
<i>Collaborative Governance</i> (Ansell dan Gash)	Kondisi Awal	1. Perspektif kolaborasi menurut stakeholder 2. Tingkat kepercayaan stakeholder
	Desain Kelembagaan	1. Partisipasi kelembagaan 2. Aturan dasar yang mendukung kolaborasi
	Kepemimpinan Fasilitas	1. Melibatkan stakeholder 2. Bertanggung jawab dalam organisasi
	Proses Kolaborasi	1. Proses kolaborasi yang transparan 2. Proses kolaborasi berjalan dengan baik 3. Bagaimana pelaksanaan kolaborasi 4. Tanggung jawab stakeholder

Sumber: Ansell and Gash (2018)

2.8 Kerangka Berfikir

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan potensi, kondisi serta hambatan yang dihadapi dengan tujuan untuk mencari data dan fakta mengenai *Collaborative Governance* dalam pengembangan ekonomi mikro pada produksi ikan salai di Kabupaten Kampar.

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Dalam konteks permasalahan yang ada, penelitian ini dilaksanakan di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pengumpulan data yang diperlukan, efisiensi waktu, serta penggunaan sumber daya tenaga dengan optimal. Penelitian ini dimulai pada bulan Juni 2024 hingga selesai.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Pada dasarnya, jenis data terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif yang di antaranya :

a. Jenis Kuantitatif

Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan

pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2014)

b. Jenis Kualitatif

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kualitatif (Sugiyono, 2014)

2. Sumber Data

Dalam setiap penelitian untuk mencapai pemahaman terhadap proses dan hasil penelitian tersebut, diperlukan data yang akurat dan faktual dari objek penelitian.

Dalam konteks ini, sumber data yang digunakan adalah :

- a. Data primer : data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti.
- b. Data sekunder : data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini

biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.

Termasuk dalam kategori data tersebut adalah :

- 1) Data bentuk teks : dokumen, pengumuman, surat-surat, spanduk
- 2) Data bentuk gambar : foto, billboard
- 3) Data bentuk suara : hasil rekaman kaset
- 4) Kombinasi teks, gambar dan suara : film, video.

Secara umum, data kualitatif dapat melibatkan berbagai bentuk, termasuk peristiwa atau fenomena yang tidak digambarkan melalui pengukuran, angka atau kuantitas.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Secara ringkas, wawancara adalah interaksi tanya jawab secara verbal untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Hasil wawancara dapat direkam dalam berbagai format, seperti tulisan, video, audio dan elemen visual. Sebagai metode pengumpulan data kualitatif, wawancara dapat dilakukan secara individu, kelompok atau dalam bentuk konferensi. Pelaksanaannya melibatkan pengajuan pertanyaan oleh pewawancara kepada narasumber, dengan pemilihan narasumber key informan yang sesuai dengan kebutuhan dan topik penelitian.

2. Dokumentasi

Studi pustaka, atau yang sering dikenal sebagai studi dokumen dalam konteks teknik pengumpulan data kualitatif, melibatkan pemeriksaan sejumlah dokumen dan sumber keputusan yang terkait dengan penelitian. Penggunaan dokumen

sebagai salah satu elemen kunci dalam penelitian kualitatif cukup umum, dan dokumen yang dianalisis dapat mencakup berbagai jenis, seperti film, iklan, literatur seperti buku, jurnal dan artikel.

3. Observasi

Observasi umumnya terkait dengan kegiatan lapangan dan merupakan salah satu metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Pelaksanaannya mencakup kunjungan langsung ke lokasi atau pengamatan terhadap kondisi sekitar objek penelitian dan kemudian dianalisis untuk menyimpulkan hasil penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Penetapan subjek: diatas dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, dimana peneliti secara selektif menentukan sampel atau informan penelitian yang dianggap memiliki kredibilitas dalam menyediakan informasi. Oleh karena itu, peneliti memilih menerapkan teknik Key Informan, yakni individu yang memiliki pengetahuan dan informasi pokok yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, informan yang diikutsertakan dalam penelitian ini berasal dari :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3. 1 Informan Penelitian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Kepala UPT Usaha Produksi Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar	1
2	Sekretaris UPT Usaha Produksi Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar	1
3	Staff UPT Usaha Produksi Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar	1
4	Investor Swasta	1
5	Masyarakat lokal	2

Sumber : UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) Usaha Produksi Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar (2023)

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Analisis data sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Sementara itu Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk peningkatan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan (Bogden *et al.*, 1982).

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif (kualitatif) terdiri dari yaitu :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi masih berupa data yang mentah yang tidak teratur, sehingga diperlukan suatu analisis agar data menjadi teratur.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang menghasilkan simpulan yang dapat dipercaya.

Jadi, setelah penelitian memperoleh data dari lapangan kemudian peneliti susun secara sistematis, selanjutnya penulis analisa data tersebut dengan menggambarkan gejala yang ada dilapangan, kemudian data tersebut dianalisis sehingga dapatlah ditarik kesimpulan akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kabupaten Kampar

Kabupaten kampar Kampar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau lahir pada tanggal 06 februari 1950, hal ini tertuang dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 02 tahun 1999 dengan rujukan peraturan undang-undang ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah, Nomor : 3 / DC / STG / 50 tanggal 06 Februari 1950. dan secara administratif pemerintahan Kabupaten Kampar dipimpin oleh Bupati pertama pada tahun 1958. Jauh sebelumnya Kampar telah memiliki sejarah panjang dengan Limo kotonya, dimana daerah ini, dulunya adalah bagian dari persukuan Minangkabau di Sumatera Barat, semasa pemerintahan system adat kenegerian yang dipimpin oleh datuk atau ninik mamak, pemerintahan Kampar dikenal dengan sebutan “Andiko 44” yang termasuk kedalam wilayah pemerintahan Andiko 44 adalah XIII Koto Kampar, VIII Koto Setingkai (Kampar Kiri), daerah Limo Koto (Kuok, Bangkinang, Salo, Airtiris dan Rumbio), X Koto di Tapung (Tapung Kiri VII dan Tapung Kanan III), III Koto Sibalimbiong (Siabu), Rokan IV Koto dan Pintu Rayo.

Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai yang disebut dengan sungai kampar. Pada zaman Belanda pembagian wilayah secara administrasi dan pemerintahan masih berdasarkan persekutuan hukum adat. Sedangkan pada masa pemerintahan Jepang, Kabupaten Kampar dijadikan satu Kabupaten dengan nama Riau Nishi Bunsu (Kabupaten Riau Barat) yang meliputi Kewedanaan Bangkinang dan

Kewedanaan Pasir Pengarayan. Dengan menyerahnya Jepang ke pihak sekutu dan setelah proklamasi kemerdekaan, maka Bangkinang kembali ke status semula, yakni Kabupaten Limapuluh Kota, dengan ketentuan dihapuskannya pembagian Administrasi Pemerintahan berturut-turut : cu (Kecamatan), gun (Kewedanaan), bun (Kabupaten), Kedemangan Bangkinang dimasukkan ke dalam Pekanbaru bun (Kabupaten) Pekanbaru.

Setelah proklamasi RI berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 November 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau terdiri dari kewedanaan Pelalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar.

1. Wilayah Geografis Letak dan Luas

Berdasarkan letak geografisnya, posisi Kabupaten Kampar mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim perekonomian, budaya adat istiadat suatu daerah. Secara geografis, posisi Kabupaten Kampar sangat strategis karena bertetangga dengan Provinsi Sumatera Barat dan dilalui jalur lintas Riau Sumatera Barat. Kekayaan kultur di Kabupaten Kampar tidak lepas dari pengaruh kebudayaan daerah tetangga yang terletak di sekitarnya. Pengaruh budaya ini lambat laun memasuki proses asimilasi dan sebagai hasilnya Kampar juga kaya akan budaya yang beragam dan khas. Wilayah Kabupaten Kampar memiliki banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai-sungai kecil, danau dan rawa-

rawa. Sungai besar diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya \pm 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Sungai Kampar mengalir dari hulu di punggung Bukit Barisan kearah Timur membelah wilayah Kabupaten Kampar. Sungai Kampar Kanan melalui beberapa kecamatan diantaranya kecamatan Koto Kampar Hulu, XIII Koto Kampar, Kuok, Salo, Bangkinang, Kampar, Kampar Timur, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Tambang, Siak Hulu.

Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih ada yang berfungsi sebagai, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang). Perairan umum dimanfaatkan untuk budidaya perikanan darat dan tempat penangkapan (*fishing ground*) berbagai jenis ikan perairan dan sebagian kecil berfungsi sebagai sarana perhubungan.

4.2 Sejarah UPT Usaha Produksi Hasil Perikanan Kabupaten Kampar

Usaha Produksi hasil perikanan di Kabupaten Kampar telah ada dan merupakan usaha yang dilaksanakan Masyarakat Kabupaten Kampar, tetapi usaha ini masih dilaksanakan secara tradisional dan merupakan upaya mempertahankan mutu ikan, hasil tangkapan nelayan yang tidak terjual segar. Kecenderungan pengolahan dilakukan terhadap ikan hasil tangkapan diperairan umum, bentuk olahan masih sangat terbatas dalam bentuk ikan asap dan ikan asin. Pengolahan ikan dilaksanakan secara individu dan masih bersifat tradisional. Seiring dengan perubahan waktu, ikan hasil tangkapan diperairan umum ikut berkurang, maka

pengolahan dalam bentuk asap berpindah dari ikan hasil tangkapan ke ikan hasil budidaya, terutama ikan jenis patin kolam. Dengan berkembang dan bertambah tempat-tempat pengolahan ikan terutama ikan salai patin yang dilaksanakan masyarakat tani nelayan secara tradisional dan sulitnya dalam pembinaan mutu hasil olahan maka direncanakan untuk menghimpun pengolah dalam satu wadah usaha yang terintegritas atau dalam satu kawasan, terutama pengolah yang ada di Desa Koto Mesjid kec. XIII Koto Kampar. Maka lahirlah Sentra pengolahan hasil perikanan air tawar Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang dibangun berdasarkan SK Dirjen P2HP RI nomor : KEP.69/DJ-P2HP/2007 tanggal 20 September 2007.

1. Wilayah Geografis Letak dan Luas

Sentra pengolahan hasil perikanan Kabupaten Kampar terletak di Desa Koto Mesjid kec. XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar terletak pada 0ampar terletak pada 0*32' 13.626 LU- 0*01' 27.275 LS dan 100*26' 50.028 BB – 101*04' 26.200 BB. Luas wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar (+-) 159.511 Ha atau sekitar (+-) 14.52% dari luas Kab. Kampar. Jarak sentra pengolahan dari ibu kota Kabupaten (+-) 40 Km dan jarak dengan ibu kota Provinsi (+-) 100 Km. Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatas dengan Kab. Rokan Hulu dan Kec. Tapung Hulu

Sebelah Selatan : Berbatas dengan Kec. Kampar Kiri dan Kec. Kampar Kiri Hulu

Sebelah Barat : Berbatas dengan Provinsi Sumatera Barat

Sebelah Timur : Berbatas dengan Kec. Kuok, Kec. Salo.

Wilayah Kabupaten Kampar saat ini memiliki luas kurang lebih 10.983,46 Km atau 11,62% dari luas keseluruhan Provinsi Riau (94.561,60 Km), yang

terbagi atas 20 (dua puluh) Wilayah Kecamatan. Daerah Kecamatan terluas adalah Kecamatan XIII Koto Kampar yang memiliki luas 1.595,11 Km atau 14,52% sedangkan Kecamatan Rumbio Jaya 77,50 Km atau 0,71% merupakan Kecamatan terkecil luasnya di Kabupaten Kampar.

4.3 Dasar Hukum UPT

Dasar Hukum UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) Usaha Produksi Hasil Perikanan Kabupaten Kampar adalah Perbub (Peraturan Bupati) Kampar Nomor 66 Tahun 2017 tentang pembentukan unit pelaksana teknis pada Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.

4.4 Visi dan Misi UPT Usaha Produksi Hasil Perikanan Kabupaten Kampar

a. Visi

Terwujudnya Produksi Pengolahan Hasil Perikanan yang Tinggi dan Berdaya Saing untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Dengan visi tersebut, diharapkan pembangunan Pengolahan perikanan Kabupaten Kampar lima tahun kedepan dapat :

1. Usaha Produksi Hasil Perikanan yang tinggi, artinya pembangunan perikanan mengarah pada tercapainya peningkatan Usaha Produksi Hasil Perikanan di Kabupaten Kampar.
2. Berdaya Saing artinya pembangunan perikanan menghasilkan produk yang dapat diperhitungkan oleh konsumen baik lokal, regional maupun keperluan ekspor.
3. Kesejahteraan Masyarakat yang berarti melalui pembangunan perikanan dengan program dan kegiatannya mengarahkan pada tujuan untuk

mengupayakan peningkatan pendapatan pembudidaya ikan, pengolah/ pemasar hasil perikanan.

b. Misi

1. Mewujudkan peningkatan Usaha Produksi Hasil Perikanan serta pemberdayaan masyarakat.
2. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil perikanan budidaya.
3. Mewujudkan peningkatan produk olahan ikan yang bermutu, aman dan bernilai jual.
4. Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan.
5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dan kualitas pelayanan SKPD.

4.5 Tugas dan Fungsi UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) Usaha Produksi Hasil Perikanan

UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) Usaha Produksi Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan lingkup Usaha Produksi Hasil Perikanan dan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kegiatan Usaha Produksi Hasil Perikanan
- b. Pelaksanaan teknis dan operasional kegiatan Usaha Produksi Hasil Perikanan
- c. Pelaksanaan ketatausahaan UPT (Unit Pelaksanaan Teknis)
- d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Usaha Produksi Hasil Perikanan.

4.6 Kondisi Sumber Daya Manusia

Untuk mengetahui kondisi pegawai Unit Pelayanan Teknis UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) Usaha Produksi Hasil Perikanan Kabupaten Kampar berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

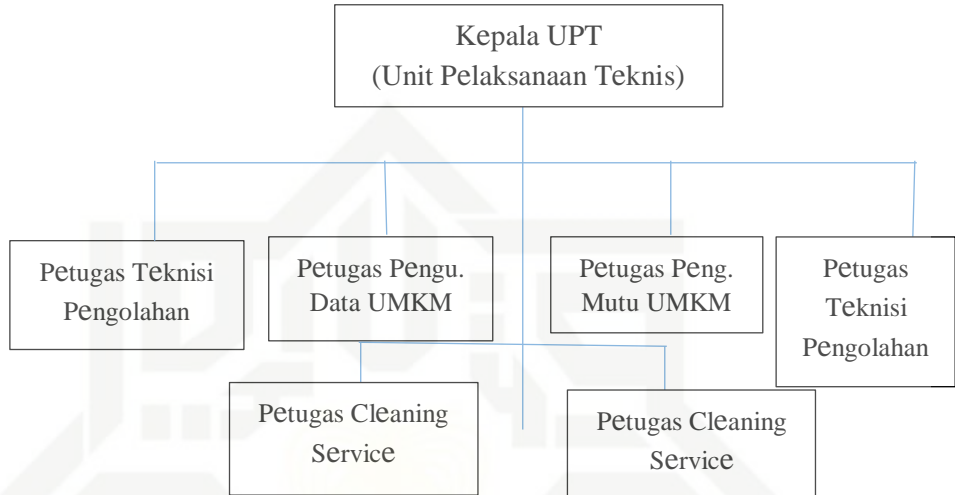
Tabel 4.1 Kondisi SDM UPT Usaha Produksi Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTA	2
2	Sarjana Strata Satu (1)	5
	JUMLAH	7

Sumber : UPT Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dengan jumlah minoritas adalah pegawai yang memiliki tingkat pendidikan SLTA sejumlah 2 orang, sedangkan jumlah mayoritas tingkat pendidikan pegawai yakni pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana Strata Satu (5) sejumlah 7 orang. Dengan demikian tingkat pendidikan pegawai UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) Usaha Produksi Hasil Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar cenderung tinggi (tamatan sarjana).

4.7 Struktur Organisasi UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) Usaha Produksi Hasil Perikanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah peneliti mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian ini dan telah disajikan kemudian dianalisis, maka peneliti menyimpulkan bahwa *Collaborative Governance* dalam pengembangan ekonomi mikro produksi ikan salai di Kabupaten Kampar Perspektif kolaborasi menunjukkan adanya pandangan yang beragam di antara stakeholder. Secara positif, kolaborasi di UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) mampu meningkatkan integrasi dan kolaborasi kegiatan, namun terdapat hambatan seperti regulasi yang kaku dan ketidakseimbangan sumber daya serta pengetahuan yang dapat menghambat efektivitas program. Stakeholder menunjukkan tingkat kepercayaan yang bervariasi terhadap pemerintah dan regulasi yang diterapkan, walaupun kepercayaan terhadap pemerintah tinggi, ketakutan terhadap regulasi yang berlebihan dapat menghambat pencapaian tujuan kolaborasi. Hambatan utama dalam kolaborasi termasuk ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan di antara stakeholder, yang dapat menghalangi kesepakatan dan mengurangi efektivitas pelaksanaan program. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi awal kolaborasi di Kabupaten Kampar dan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam mendukung pengembangan ekonomi mikro di wilayah Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

1. Sebaiknya UPT(Unit Pelaksanaan Teknis) Usaha Produksi Hasil Prikanan Dinas Prikanan Kabupaten Kampar seharusnya memberikan konteks tentang industri pengolahan ikan salai di Kabupaten Kampar, termasuk potensi ekonomi mikro yang terlibat dan pentingnya pengelolaan limbah dalam konteks pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kolaborasi antara semua pihak terkait dalam pengelolaan limbah dan penerapan GMP serta SSOP. (GMP merupakan manajemen standar yang dilakukan oleh pemerintah sedangkan SSOP prosedur pelaksanaan sanitasi dan pengendalian proses dalam program sanitasi).
3. Peningkatan kerja sama antara UPT(Unit Pelaksanaan Teknis) Dinas Perikanan, pengelolaan ikan, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan stabilitas pasokan dan mendukung pertumbuhan industri ikan salai perlu dilakukan secara optimal.
4. Fokuskan analisis pada faktor-faktor yang menyebabkan ketidakstabilan pasokan bahan baku ikan patin, seperti kondisi kolam yang tidak tetap dan fluktuasi permintaan yang meningkat. Identifikasi dampak dari ketidakstabilan pasokan ini terhadap industri pengolahan ikan salai dan ekonomi mikro di Kabupaten Kampar.
5. Perlu peningkatan fasilitas dalam pengelolaan produksi ikan salai
6. Upaya kolaborasi antara UPT (Unit Pelaksanaan Teknis), Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Investor perlu ditingkatkan lagi agar mendapatkan hasil yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arikunto. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Produk*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bogden *et al.* (1982). *Qualitative Research For Education: an Intrudaction To Theory nd Method*. London: Boston London.

Erwin. (2020). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jl. Tamangapa Raya. Cendekia Publisher.

Islamy. (2018). *Collaborative Governane Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.

Noor *et al.* (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Banguntapan Bantul Yogyakarta. BILDUNG.

Skripsi :

Fahrika. (2023). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Sumber Daya Ikan Di Sungai Mesuji (Studi Di Desa Wiralaga 1 Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji)*. Universitas islam negeri raden intan lampung.

Maulidana. (2022). *Kebijakan pemerintah daerah kabupaten pelalawan guna memberdayakan ekonomi daerah*. *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.

Pangesti. (2018). *Pengaruh Produksi Ikan Tuna, Gross Domestic product (gdp) jepang dan harga relatif terhadap ekspor ikan tuna indonesia ke jepang tahun 1985-2016*. Universitas negeri jakarta.

Reski. (2022). *Collaborative governance dalam pengelolaan objek wisata danau raja di kabupaten indragiri hulu*. *Universitas islam negeri sultan syarif kasim riau*.

Jurnal :

Aisyah *et al.* (2019). *Culture Based Fisheries (Cbf) Sebagai Upaya Meningkatkan Produksi Ikan Di Waduk*. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*. Volume 11 Nomor 1 Mei 2019.

Danastry *et al.* (2021). *Tata Kelola Kolaboratif pada Penetrasi Jaringan Fixed Broadband di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, Vol 7, No 2, Hal. 158-163.

Diani *et al.* (2017). *Analisis Penerapan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour*. *Forum Ilmu Sosial* 44 (1), pp 43-54.

- Emerson *et al.* (2024). An Integrative Framework for Collaborative. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 1-29.
- Fariedah. (2018). Penggunaan Tanah Liat Untuk Keberhasilan Pemijahan Ikan Patin Siam (*Pangasianodon hypophthalmus*). *JURNAL ILMIAH PERIKANAN DAN KELAUTAN*. Volume 10 No 2. 2018.
- Hadiaty. (2017). Iktiofauna air tawar Pulau Enggano, Indonesia. *Jurnal Iktiologi Indonesia*, 17(3): 273-287.
- Irawan. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *IR - Perpustakaan Universitas Airlangga*, 1-12 Volume 5, No.3.
- Kartamihardja. (2008). Kebijakan Pemauan Sumber Daya Ikan Di Perairan Umum Daratan Indonesia: Teknologi Alternatif Untuk Meningkatkan Produksi Ikan Dan Pendapatan Nelayan. *Jurnak Kebijak Perikan Indonesian*. Vol. 1 No. 2.
- Putra. (2018). Peningkatan Jumlah Wirausahawan Di Indonesia Melalui Kolaborasi Akademisi- Pelaku Usaha- Mahasiswa. *Economicus*, Vol. 12 No. 1 .
- Ritonga. (2023). Pengaruh Perendaman Larutan Teh Hijau (*Camellia Sinensis*) terhadap Perkembangan Embrio Ikan Patin (*Pangasius Pangasius*). *Journal of Basic Educational Studies*. Vol 3 No 1 (2023) 84-90.
- Saputra. (2020). Tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 13, Nomor 2, (85-97).
- Yunani. (2018). THE POTENTIAL ANALYSIS OF MICRO ECONOMIC DEVELOPMENT IN DISTRICT HULU SUNGAI TENGAH. *Ecoplan Vol. 1 No. 1* , 36-46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 1:

TRANSKIP WAWANCARA

A. Narasumber 1:

Nama : Wancandra, S.Ap (Kepala UPT)

Waktu : 21 Juni 2024

Variabel	Subindikator	Pertanyaan
Kondisi Awal	a. Perspektif kolaborasi menurut stakeholder	1. Bagaimana kondisi awal dalam pengembangan ekonomi mikro produksi ikan salai sebelum adanya kolaborasi?
	b. Tingkat kepercayaan stakeholder	1. Bagaimana tingkat kepercayaan bapak terhadap stakeholder pada awal kolaborasi ini? 2. Apakah UPT pernah mengalami situasi dimana pihak lain tidak memenuhi janji atau komitmen mereka?
Desain Kelembagaan	a. Partisipasi kelembagaan	1. Apakah ada pelatihan atau tim khusus yang dibentuk untuk mengkoordinasikan UPT dalam perencanaan kelembagaan?
	b. Aturan dasar yang mendukung kolaborasi	1. Apakah UPT dinas perikanan memiliki aturan dasar atau pedoman yang jelas untuk mendukung kolaborasi dengan mitra dalam pengembangan ekonomi mikro?
Kepemimpinan Fasilitas	a. Melibatkan stakeholder	1. Bagaimana cara UPT memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam proses kolaborasi?
	b. Bertanggung jawab dalam organisasi	1. Bagaimana UPT mengukur dan mengevaluasi efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi mikro?
Proses Kolaborasi	a. Proses kolaborasi yang transparan	1. Apakah proses kolaborasi yang dijalankan ini berjalan dengan transparan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Proses kolaborasi berjalan dengan baik	1. Apakah proses kolaborasi ini sudah berjalan dengan baik?
c. Pelaksanaan kolaborasi	1. Bagaimana proses pelaksanaan kolaborasi terhadap pengembangan ekonomi mikro dalam produksi ikan salai?
d. Tanggung jawab stakeholder	1. Bagaimana cara memastikan bahwa semua pihak memahami dan menjalankan tanggung jawab mereka secara konsisten?

B. Narasumber 2:

Nama : Sekretaris UPT (Unit Pelaksanaan Teknis)

Waktu : 21 Juni 2024

Variabel	Subindikator	Pertanyaan
Kondisi Awal	a. Perspektif kolaborasi menurut stakeholder	1. Bagaimana kondisi awal dalam pengembangan ekonomi mikro produksi ikan salai sebelum adanya kolaborasi?
	b. Tingkat kepercayaan stakeholder	1. Bagaimana tingkat kepercayaan bapak terhadap stakeholder pada awal kolaborasi ini? 2. Apakah UPT pernah mengalami situasi dimana pihak lain tidak memenuhi janji atau komitmen mereka?
Desain Kelembagaan	a. Partisipasi Kelembagaan	1. Apakah ada pelatihan atau tim khusus yang dibentuk untuk mengkoordinasikan UPT dalam perencanaan kelembagaan?
	b. Aturan dasar yang mendukung	1. Apakah UPT dinas perikanan memiliki aturan dasar atau pedoman yang jelas untuk mendukung kolaborasi dengan mitra dalam pengembangan ekonomi mikro?
Kepemimpinan Fasilitas	a. Melibatkan stakeholder	1. Bagaimana cara UPT memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam proses kolaborasi?
	b. Bertanggung jawab dalam	1. bagaimana UPT mengukur dan mengevaluasi efektivitas kolaborasi

	organisasi	antar pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi mikro?
Proses Kolaborasi	a. Proses kolaborasi yang transparan	1. apakah proses kolaborasi yang dijalankan ini berjalan dengan transparan?
	b. Proses kolaborasi berjalan dengan baik	1. apakah proses kolaborasi ini sudah berjalan dengan baik?
	c. Pelaksanaan kolaborasi	1. bagaimana proses pelaksanaan kolaborasi terhadap pengembangan ekonomi mikro dalam produksi ikan salai?
	d. Tanggung jawab stakeholder	1. bagaimana cara memastikan bahwa semua pihak memahami dan menjalankan tanggung jawab mereka secara konsisten?

C. Narasumber 3

Nama : Herman S.Pi (Staff UPT/Teknisi Pengolahan)

Waktu : 21 Juni 2024

Variabel	Subindikator	Pertanyaan
Kondisi Awal	c. Perspektif kolaborasi menurut stakeholder	2. Bagaimana kondisi awal dalam pengembangan ekonomi mikro produksi ikan salai sebelum adanya kolaborasi?
	d. Tingkat kepercayaan stakeholder	3. Bagaimana tingkat kepercayaan bapak terhadap stakeholder pada awal kolaborasi ini? 4. Apakah UPT pernah mengalami situasi dimana pihak lain tidak memenuhi janji atau komitmen mereka?
Desain Kelembagaan	c. Partisipasi Kelembagaan	2. Apakah ada pelatihan atau tim khusus yang dibentuk untuk mengkoordinasikan UPT dalam perencanaan kelembagaan?
	d. Aturan dasar	2. Apakah UPT dinas

	yang mendukung	perikanan memiliki aturan dasar atau pedoman yang jelas untuk mendukung kolaborasi dengan mitra dalam pengembangan ekonomi mikro?
Kepemimpinan Fasilitas	c. Melibatkan stakeholder	2. Bagaimana cara UPT memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam proses kolaborasi?
	d. Bertanggung jawab dalam organisasi	2. bagaimana UPT mengukur dan mengevaluasi efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi mikro?
Proses Kolaborasi	e. Proses kolaborasi yang transparan	2. apakah proses kolaborasi yang dijalankan ini berjalan dengan transparan?
	f. Proses kolaborasi berjalan dengan baik	2. apakah proses kolaborasi ini sudah berjalan dengan baik?
	g. Pelaksanaan kolaborasi	2. bagaimana proses pelaksanaan kolaborasi terhadap pengembangan ekonomi mikro dalam produksi ikan salai?
	h. Tanggung jawab stakeholder	2. bagaimana cara memastikan bahwa semua pihak memahami dan menjalankan tanggung jawab mereka secara konsisten?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Narasumber 4

Nama : Investor Swasta

Waktu : 21 Juni 2024

Variabel	Subindikator	Pertanyaan
Kondisi Awal	e. Perspektif kolaborasi menurut stakeholder	3. Bagaimana kondisi awal dalam pengembangan ekonomi mikro produksi ikan salai sebelum adanya kolaborasi?
	f. Tingkat kepercayaan stakeholder	5. Bagaimana tingkat kepercayaan bapak terhadap stakeholder pada awal kolaborasi ini? 6. Apakah UPT pernah mengalami situasi dimana pihak lain tidak memenuhi janji atau komitmen mereka?
Desain Kelembagaan	e. Partisipasi Kelembagaan	3. Apakah ada pelatihan atau tim khusus yang dibentuk untuk mengkoordinasikan UPT dalam perencanaan kelembagaan?
	f. Aturan dasar yang mendukung	3. Apakah UPT dinas perikanan memiliki aturan dasar atau pedoman yang jelas untuk mendukung kolaborasi dengan mitra dalam pengembangan ekonomi mikro?
Kepemimpinan Fasilitas	e. Melibatkan stakeholder	3. Bagaimana cara UPT memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam proses kolaborasi?
	f. Bertanggung jawab dalam organisasi	3. bagaimana UPT mengukur dan mengevaluasi efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi mikro?
Proses	i. Proses	3. apakah proses kolaborasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kolaborasi	kolaborasi yang transparan	yang dijalankan ini berjalan dengan transparan?
	j. Proses kolaborasi berjalan dengan baik	3. apakah proses kolaborasi ini sudah berjalan dengan baik?
	k. Pelaksanaan kolaborasi	3. bagaimana proses pelaksanaan kolaborasi terhadap pengembangan ekonomi mikro dalam produksi ikan salai?
	l. Tanggung jawab stakeholder	3. bagaimana cara memastikan bahwa semua pihak memahami dan menjalankan tanggung jawab mereka secara konsisten?

E. Narasumber 5

Nama : Yendri (Masyarakat)

Waktu : 26 Juni 2024

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Menurut anda, apa sisi negatif dan positif dari adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi mikro?	dari sisi negatifnya yaitu lebih sulit karena adanya regulasi di kolaborasi, dan adapun dari segi positifnya yaitu kegiatan yang akan dilaksanakan di UPT akan lebih terintegrasi.
2	Berapa banyak anggota lembaga yang terlibat dalam pengambilan keputusan tentang program produksi ikan salai di kabupaten kampar?	jumlah anggota lembaga yang terlibat dalam pengambilan keputusan tentang program produksi ikan salai di Kabupaten Kampar adalah terdiri dari perwakilan dari UPT, menteri kelautan dan perikanan, dan investor. Melalui kolaborasi mereka, keputusan strategis dapat diambil untuk memajukan program ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan.
3	Bagaimana pemerintah mempromosikan partisipasi aktif	partisipasi pemerintah melakukan expo-expo dalam melakukan promosi dan pameran-pameran kegiatan prodak, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	masyarakat dalam implementasi program pengembangan ekonomi mikro?	dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kewirausahaan, mendirikan pusat-pusat pendukung bisnis, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program melalui musyawarah dan konsultasi publik.
4	Bagaimana mekanisme komunikasi yang digunakan dalam memastikan transparansi dalam kolaborasi antara pemerintah dan pelaku yang terkait?	dengan melakukan pendidikan-pendidikan dan pelatihan.

F. Narasumber 6

Nama : Hasanah (Masyarakat)

Waktu : 26 Juni 2024

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Menurut anda, apa sisi negatif dan positif dari adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi mikro?	di sisi positifnya, kegiatan yang direncanakan di UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) akan lebih terkoordinasi secara menyeluruh. Dan adapun sisi negatifnya yaitu Aspek yang kurang menguntungkan adalah kesulitan yang muncul karena adanya aturan dalam kolaborasi.
2	Berapa banyak anggota lembaga yang terlibat dalam pengambilan keputusan tentang program produksi ikan salai di kabupaten kampar?	adapun jumlah anggota lembaga yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait program produksi ikan salai di Kabupaten Kampar mencakup perwakilan dari UPT, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta investor. Melalui kerja sama mereka, keputusan strategis dapat diambil untuk memajukan program ini dengan memperhatikan berbagai aspek yang tepat.
3	Bagaimana pemerintah mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam implementasi program	cara pemerintah yaitu dengan mengadakan pameran, expo-expo dan juga promosi kegiatan prodak yang dilakukan.

	pengembangan ekonomi mikro?	
4	Bagaimana mekanisme komunikasi yang digunakan dalam memastikan transparansi dalam kolaborasi antara pemerintah dan pelaku yang terkait?	untuk memastikan transparansi dalam kolaborasi antara pemerintah dan pelaku yang terlibat yaitu dengan dengan melakukan pelatihan, pendidikan, penilaian kinerja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 2

DAFTAR DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Kepala UPT (Unit Pelaksanaan Teknis)



Wawancara dengan Sekretaris UPT (Unit Pelaksanaan teknis)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Staff UPT (Unit Pelaksanaan Teknis)



Wawancara dengan Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan masyarakat



Gambar UPT (Unit Pelaksanaan Teknis)